

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Lembaga keuangan merupakan bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat dalam pemakai jasa keuangan. Dalam hal ini yang dimaksud lembaga keuangan adalah bank. Bank adalah lembaga keuangan yang. Namun saat ini telah berkembang kembali bank yang memiliki prinsip islam yaitu perbankan syariah.

Pada perjalanannya, sistem perbankan berbasis syariah saat ini semakin hari semakin populer dikalangan masyarakat, baik dinegara maju maupun di negara berkembang. Bahkan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia sendiri saat ini sudah sangat pesat. Perkembangan ini didukung pula oleh masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Sehingga membuat perbankan syariah berupaya melakukan inovasi-inovasi produk dan meningkatkan kualitasnya.

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang dalam operasinya dan produk-produknya berdasarkan pada prinsip syariat islam.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Kontemporer*, cet. Ke-1 (yogyakarta: UII Press, 2000), hlm.62.

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah,<sup>2</sup> hal ini yang menjadi titik tolak pembeda dengan bank konvensional. Sehingga suatu produk yang dikeluarkan oleh suatu bank harus bersinergi dengan akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah juga bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, yaitu meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Bank Syariah melakukan kegiatan usahanya di bidang lembaga keuangan bank. Oleh karena itu, bank syariah wajib menjalankan fungsi utamanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat.

Era perkembangan teknologi sekarang yang semakin canggih dan modern, begitu juga dengan cara hutang piutang yang berkembang dengan berbagai macam caranya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu bentuk dari hutang piutang saat ini adalah dapat dilihat dalam bentuk kartu kredit.<sup>3</sup>

Kartu kredit adalah kartu plastik yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran dan pengambilan uang tunai.<sup>4</sup> Kartu ini juga dapat diuangkan diberbagai tempat seperti ATM. ATM biasanya tersebar di berbagai tempat yang strategis seperti pusat pembelanjaan, hiburan dan perkantoran.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Bank Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*.

<sup>3</sup> Halimah, *Denda Keterlambatan (Late Charge) Pada Kartu Kredit Syariah (Studi Analisis Fatwa DSN MUI No:54/Dsnmui/X/2006 Tentang Syariah Card)*, (Skrispi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010), diakses pada tanggal 02 Januari 2018 pukul: 15.00 WIB melalui [http://eprints.walisongo.ac.id/3084/2/2105190\\_Bab1.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/3084/2/2105190_Bab1.pdf), hlm.3.

<sup>4</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 170.

<sup>5</sup> Kamsir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo, 2008), hlm. 338.

Dalam pemakaian kartu kredit bisa pula terjadi pada seseorang yang meminjam uang kepada pihak bank, kemudian pinjaman tersebut dapat dibayar secara berangsur-angsur atau cicilan.<sup>6</sup>

Perkembangan zaman yang semakin modern, dengan itu perbankan syariah mengeluarkan kartu kredit yang menggunakan sistem berbasis syariah yang mana lebih dikenal dengan *syariah card*. *Syariah card* adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah.<sup>7</sup>

Ketentuan kartu kredit syariah (*Syariah Card*) merujuk pada al-qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 280, yaitu:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”<sup>8</sup>

Bank BNI Syariah telah me-*launching* salah satu jenis pembiayaan yang berbasis kartu kredit yaitu iB Hasanah *Card*. Peluncuran produk iB Hasanah *Card* adalah untuk menyediakan produk dan layanan perbankan sesuai kebutuhan masyarakat dengan gaya hidup modern yang berbasis syariah.

iB Hasanah *Card* diluncurkan pada tanggal 9 Februari 2008 bersamaan dengan *Mastercard Worldwide*, sebagaimana diatur dalam Fatwa Dewan Syariah

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Pesada, 2007), hlm. 299.

<sup>7</sup> Fatwa DSN MUI No.54/ DSN-MUI/ X/ 2006 tentang *Syariah Card*. Pdf.

<sup>8</sup> Syamsuddin Ali bin Mahrus, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), hlm. 37.

Nasional yang mana untuk memudahkan sistem pembayaran serta sebagai jaminan transaksi pembelian barang dan jasa.<sup>9</sup> Ditinjau dari aspek hukum, iB Hasanah Card dipayungi dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*.<sup>10</sup>

iB Hasanah Card adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari status kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan pembelanjaan dan atau atas penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi dahulu oleh *acquirer* atau *issuer* (penerbit kartu), dan atas transaksi tersebut maka pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati, baik secara sekaligus maupun secara angsuran.

Perbedaan antara kartu kredit syariah dan kartu kredit konvensional terletak pada akad yang digunakan, dimana akad tersebut yaitu akad-akad yang sejalan dengan prinsip ekonomi syariah. Namun dalam prosedur pengajuan dan penggunaannya pada dasarnya hampir sama dengan kartu kredit pada bank konvensional.

Dalam perjanjian di BNI Syariah cabang Bandung, pembayaran yang dilakukan tidak dilakukan dengan bunga tetapi dengan akad *kafalah*, *qardh*, dan *ijarah*. Selain itu, transaksi hanya bisa digunakan untuk transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. iB Hasanah Card juga tidak mendorong nasabah pada

---

<sup>9</sup> Nama produk kartu kredit syariah yang dikeluarkan oleh bank BNI Syariah dan diresmikan pada tanggal 7 Februari 2009, melalui <http://www.bni.co.id>, diakses pada tanggal 16 Juni 2017 pukul: 13:57.

<sup>10</sup> Fatwa DSN MUI No.54/ DSN-MUI/ X/ 2006 tentang *Syariah Card*. Pdf.

pengeluaran yang berlebihan atau memiliki sifat yang konsumtif, dan juga harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.

Akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.<sup>11</sup>

Akad *Kafalah*, BNI Syariah adalah penjamin bagi pemegang iB Hasanah Card terhadap *Merchant* (pedagang) atas semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi antara pemegang iB Hasanah Card dengan *Merchant* (pedagang) dan atau penarikan tunai. Atas pemberian *kafalah*, BNI Syariah dapat menerima *monthly membership fee* (biaya atau iuran keanggotaan bulanan).<sup>12</sup>

Akad *Qardh*, BNI Syariah adalah pemberi pinjaman pemegang iB Hasanah Card atas seluruh transaksi penarikan tunai dengan menggunakan kartu dan transaksi pinjaman dana. Dalam akad ini tidak muncul *fee* (biaya).<sup>13</sup> Dalam pengambilan uang *cash* (tunai) dapat diambil 20% dari limit kartu yang digunakan.<sup>14</sup>

Akad *Ijarah*, BNI Syariah adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang iB Hasanah Card. Atas *Ijarah* ini, pemegang iB Hasanah Card dikenakan *annual membership fee* (*rusum al-'udhwiyyah*) (biaya atau iuran keanggotaan tahunan).<sup>15</sup>

Dalam akad *Kafalah* dan akad *Ijarah* menggunakan *fee* (biaya) atas jasa yang dilakukan. Berbeda dengan akad *Qardh* dimana disebutkan bahwa

---

<sup>11</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 65.

<sup>12</sup> Lihat brosur BNI Syariah.

<sup>13</sup> Lihat brosur BNI Syariah.

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan bapak Fadli pihak BNI Syariah.

<sup>15</sup> Lihat brosur BNI Syariah.

penggunaan akad *qardh* tidak boleh ada imbalan (*ujrah*),<sup>16</sup> memang benar pada implementasinya secara tidak langsung tidak menerima imbalan (*ujrah*) dari akad *qard*.<sup>17</sup> Namun dalam akad *Qardh* hanya dikenakan biaya administrasi setiap kali transaksi dengan biaya Rp.25.000,- .

Dalam mekanisme kartu kredit pada umumnya, bahwa iB Hasanah *Card* apabila *card holder* (peminjam) terlambat dalam melakukan pembayaran dalam batas waktu yang ditentukan maka ia berkewajiban untuk membayar denda keterlambatan (*late charge*).<sup>18</sup> Denda yang dikenakan dalam iB Hasanah *Card* kepada *card holder* (peminjam) yaitu denda berupa *ta'widh* (ganti rugi). Di bank BNI Syariah ini, nilai *ta'widh* ini dijadikan nilai dari *late charge* untuk pengguna kartu jika nasabah telat membayar kewajiban yang telah jatuh tempo.

Dalam ketetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*, bahwa DSN memperbolehkan menggunakan denda keterlambatan (*late charge*) dengan skema *ta'widh* yang disebutkan dalam ketentuan ke 6 (enam) pada point “a” yang berbunyi:

“Penerbit kartu dapat mengenakan *ta'widh* yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.”<sup>19</sup>

Sebagai pengguna iB Hasanah *Card* sudah seharusnya memenuhi kewajiban baik dalam biaya, peraturan dan juga kebijakan yang ditetapkan oleh pihak *Issuer* (penerbit kartu). Begitu juga kewajiban yang harus dipenuhi ketika

<sup>16</sup> Hasil Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Fadli pihak BNI Syariah

<sup>17</sup> Hengki Firmanda, *Syariah Card (Katu Kredit Syariah Ditinjau dari Asas Utilitas dan Asas Maslahah)*, (Pekanbaru: Jurnal Ilmu Hukum, 2014), hlm. 281.

<sup>18</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 289.

<sup>19</sup> Lihat Fatwa DSN MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*. Pdf.

nasabah telat membayar tagihan setelah jatuh tempo atas transaksi yang pernah dilakukan. Ketentuan biaya *ta'widh* (ganti rugi) telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 dan juga Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh*.

*Ta'widh* adalah biaya ganti rugi yang disebabkan karena kelalaian nasabah dalam membayar tagihan yang mana menyebabkan kerugian bagi bank atau penerbit kartu dan dana tersebut dimasukkan dalam pendapatan bank.

Dengan adanya Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang *ta'widh* dan Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004, maka bank diperbolehkan meminta ganti rugi kepada nasabah yang telat membayar tagihan setelah jatuh tempo. Biaya atau ongkos ganti rugi yang harus dibayar *card holder* (peminjam) kepada *Issuer* (penerbit kartu) yang mana disebutkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 dalam ketentuan ganti rugi (*ta'widh*) pasal 19 yang berbunyi:<sup>20</sup>

“Bank dapat mengenakan ganti rugi (*ta'widh*) hanya atas kerugian riil (*real loss*) yang dapat diperhitungkan dengan jelas kepada nasabah yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan mengakibatkan kerugian pada bank.”

“Besar ganti rugi yang dapat diakui sebagai pendapatan bank adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang berkaitan dengan upaya bank untuk memperoleh pembayaran dari nasabah dan bukan kerugian yang akan diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i'ah*).”

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang *ta'widh* dan Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004, bahwa ongkos yang harus

---

<sup>20</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, pada bagian ketiga ketentuan *ta'widh*, pasal 19. Pdf.



diganti dalam *ta'widh* haruslah berdasarkan pada kerugian riil bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi dan biaya kerugian tersebut dapat diperhitungkan dengan jelas.

Dalam penentuan *ta'widh* biaya ganti rugi tersebut tidak boleh dicantumkan dalam akad sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004.

Akan tetapi, dalam praktiknya biaya *ta'widh* (ganti rugi) di Bank BNI Syariah cabang Bandung ditetapkan jumlahnya berdasarkan pada jangka waktu setelah jatuh tempo dan biaya *ta'widh* tidak diperhitungkan dengan jelas karena sudah ketetapan dari pihak banknya. Adapun dalam penentuan ongkos *ta'widh* (ganti rugi) telah ditentukan dan dicantumkan dalam akad.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PENENTUAN DENDA KETERLAMBATAN (*LATE CHARGE*) PADA PRODUK PEMBIAYAAN *iB HASANAH CARD* DI BNI SYARIAH CABANG BANDUNG”**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, bahwa apabila nasabah telat membayar tagihan setelah jatuh tempo maka akan dikenakan denda keterlambatan (*late charge*) berupa biaya ganti rugi (*ta'widh*). Dimana pemberlakuan denda ini ditetapkan dalam Fatwa DSN MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 dengan skema *ta'widh* yang mana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/46/PBI/2005 dan Fatwa DSN MUI No.43/DSN-



MUI/VIII/2004. Dalam ketentuan PBI dan Fatwa tentang *ta'widh* bahwa biaya ganti rugi harus kerugian yang riil, bukan kerugian yang diperkirakan terjadi. Akan tetapi, dalam praktiknya di BNI Syariah Cabang Bandung dalam menetapkan denda keterlambatan (*late charge*) berupa biaya ganti rugi (*ta'widh*) ini jumlahnya didasarkan pada jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Bank BNI Syariah dan mengenai biaya *ta'widh* ini besar nominalnya sudah merupakan ketentuan dari pihak BNI Syariah, tidak ada perhitungannya. Penentuan ongkos *ta'widh* pun sudah ditentukan dan dicantumkan diawal akad.

Agar penelitian ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan dan menghindari kesalahan data dalam penelitian, maka diperlukan perumusan-perumusan dengan pembatasan masalah yang akan diteliti. Rumusan yang akan diteliti yaitu:

1. Bagaimana mekanisme terhadap pemberlakuan denda keterlambatan (*late charge*) pada produk pembiayaan iB Hasanah Card?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap denda keterlambatan dengan skema *ta'widh* (ganti rugi) pada produk pembiayaan iB Hasanah Card?

### **C. Tujuan Penelitian**

Merujuk pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin penulis capai melalui penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme terhadap pemberlakuan denda keterlambatan (*late charge*) pada produk pembiayaan iB Hasanah Card.

2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap denda keterlambatan dengan skema *ta'widh* pada produk pembiayaan iB Hasanah Card.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diperoleh dari penulis antara lain hasil pengamatan dapat menjadi masukan dan pertimbangan dalam melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dapat menjadi sebuah informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

##### **1. Akademik**

Penelitian ini bermanfaat sebagai menambah khasanah-khasanah ilmu terutama untuk menunjang wawasan dan pengetahuan khususnya dalam bidang Perbankan Syariah dengan memperoleh gambaran nyata yang berkenaan dengan denda keterlambatan bagi nasabah yang telat membayar tagihan setelah jatuh tempo pada produk pembiayaan iB Hasanah Card menurut Hukum Ekonomi Syariah, yang dilihat pula dalam Fatwa DSN MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card* dan Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh* serta Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005. Selain itu memberikan wacana baru bagi peneliti dalam hal mekanisme pelaksanaan akad iB Hasanah Card, dan juga pandangan Islam terhadap denda keterlambatan yang memberlakukan denda berupa ganti rugi (*ta'widh*.)

## 2. Praktis

Manfaat penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi para praktisi bank-bank yang berbasis Syariah, serta untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan yang berguna sebagai pedoman bagi pihak-pihak yang membutuhkan dalam penelitian yang relevan dan komprehensif.

### E. Studi Terdahulu

Sebelum membuat skripsi ini, penulis melakukan perbandingan antara penelitian penelitian yang terdahulu untuk mendukung materi dalam penelitian ini. Sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang mengangkat tema tentang iB Hasanah Card. Salah satu diantaranya adalah:

1. Muchtar Adiwijaya, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2014.

“Aplikasi Denda Pada Produk iB Hasanah Card di BNI Syariah Cabang Bandung”

Hasil dari penelitian Muchtar Adiwijaya, dapat disimpulkan bahwa penentuan denda pada produk iB Hasanah Card ini belum sesuai dengan fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang nasabah yang mampu namun menunda-nunda pembayaran utang yang mana terdapat pada ketentuan poin 5 (lima) bahwa ketentuan sanksi berupa *ta'zir* ini harus ada kesepakatan diantara kedua belah pihak, namun pada kasus ini nasabah tidak mengetahui mengenai pengenaan denda apabila telat membayar tagihan setelah jatuh tempo.

2. Muhammad Khanif Junaedi, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2014.

“Penyelesaian Pendanaan Bermasalah Pada Tabungan iB Pendidikan di Bank CIMB Niaga Syariah KCS Bandung”

Dalam penelitian ini Muhammad Khanif Junaedi, menyimpulkan bahwa pelaksanaan tabungan iB Pendidikan Syariah hampir sama dengan produk lainnya dan yang menjadi perbedaannya yaitu dari segi akadnya dengan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, untuk penarikannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati antara kedua belah pihak.

Dalam masalah penyelesaian pendanaannya sudah sesuai dengan peraturan yang diterapkan UU Perbankan Syariah. Dikaitkan dengan denda *ta'widh* pada produk ini belum sesuai dengan fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *ta'widh*, namun jika dilihat dari segi penyelesaiannya sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI dan asas-asas muamalah.

3. Nadya Wuri Handayani, Jurusan Muamalah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2013.

“Tinjauan Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) Pada Produk KPR Indensya BTN iB Melalui Akad Istishna' di Bank Tabungan Di Negara Cabang Bandung”

Dalam penelitian Nadya Wuri Handayani, disimpulkan bahwa mekanisme pembayaran denda ganti rugi (*ta'widh*) karena adanya penundaan pelunasan oleh nasabah dalam pembiayaan KPR Indensya BTN iB dan proses *ta'widh* telah dicantumkan di awal akad. Tentunya ini bertentangan dengan

fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*), bahwa dalam ketentuan fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 biaya atau ongkos ganti rugi tidak boleh dicantumkan di awal akad. Adapun implementasi fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*) dalam produk KPR Indensya BTN iB dengan melalui akad Istishna adalah ganti rugi yang diterima diakui sebagai pendapatan bank. Namun biaya besar ganti rugi atas keterlambatan nasabah dihitung berdasarkan jumlah hari tunggakan.

4. Achmad Boys Awaluddin Rifa'i, Program Studi Muamalah, Sekolah Tinggi Agama Islam Asy-Syukriyyah Tangerang, 2006.

“Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor 54 Tahun 2006 Tentang Syariah Card Pada Produk iB Hasanah Card Bank BNI Syariah Tbk”

Dari hasil penelitian Achmad Boys Awaluddin Rifa'i, disimpulkan bahwa bank BNI Syariah pada umumnya telah menjalankan operasional iB Hasanah Card sudah benar dan mengacu pada fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, namun saja ada beberapa point dari fitur iB Hasanah Card yang lebih khusus dalam fatwa DSN-MUI No.54 tahun 2006 yang tidak sesuai yaitu mengenai ketentuan biaya-biaya (*fee*).

**Tabel 1.1**  
**Studi Terdahulu**

| No | Penulis                 | Judul  | Persamaan  | Perbedaan   |
|----|-------------------------|--|--|---|
| 1. | Muchtar Adiwijaya       | Aplikasi Denda Pada Produk iB Hasanah Card di BNI Syariah Cabang Bandung                             | Persamaan penulis dengan skripsi ini yaitu menjelaskan denda bagi nasabah yang telat membayar tagihan setelah jatuh tempo pada produk pembiayaan iB Hasanah Card di BNI Syariah Cabang Bandung | Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi ini yaitu pada skripsi ini menjelaskan tentang denda keterlambatan dengan berlandaskan pada fatwa DSN MUI No.17/tentang nasabah yang mampu namun menunda-nunda pembayaran. Sedangkan skripsi penulis menjelaskan tentang denda keterlambatan dengan berlandaskan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang <i>Ta'widh</i> . |
| 2. | Muhammad Khanif Junaedi | Penyelesaian Pendanaan Bermasalah Pada Tabungan iB Pendidikan di Bank CIMB Niaga Syariah KCS Bandung | Persamaan dengan skripsi ini yaitu sama membahas tentang <i>ta'widh</i> .  | Perbedaan dengan skripsi ini yaitu membahas produk tabungan iB Pendidikan di CIMB Niaga Syariah yang dikaitkan dengan denda ganti rugi ( <i>ta'widh</i> ). Sedangkan penulis membahas <i>ta'widh</i>  |

Lanjutan dari tabel 1.1

|    |                              |  |   |  |
|----|------------------------------|--|---|--|
|    |                              |  |   | Pada produk pembiayaan iB Hasanah <i>Card</i> .  |
| 3. | Nadya Wuri Handayani         | Tinjauan Fatwa DSN No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi ( <i>Ta'widh</i> ) Pada Produk KPR Indensya BTN iB Melalui Akad Istishna' Di Bank Tabungan Negara Cabang Bandung | Persamaan penulis dengan skripsi ini yaitu membahas tentang denda keterlambatan dengan skema <i>ta'widh</i> . | Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi ini yaitu penulis membahas <i>ta'widh</i> (ganti rugi) pada produk pembiayaan iB Hasanah <i>Card</i> , sedangkan skripsi ini diterapkan pada produk pembiayaan KPR Indensya BTN iB Melalui Akad Istishna'.                      |
| 4. | Achmad Boys Awaluddin Rifa'i | Analisis Fatwa Dsn-Mui Nomor 54 Tahun 2006 Tentang Syariah Card Pada Produk iB Hasanah Card Bank BNI Syariah Tbk.  | Persamaan penulis dengan skripsi ini yaitu menganalisis tentang iB Hasanah <i>Card</i> di Bank BNI Syariah.   | pada skripsi ini meneliti kesesuaian operasional bank BNI Syariah dengan Fatwa yang ada dan kesesuaian dalam ketentuan biaya-biaya ( <i>fee</i> ). Sedangkan penulis membahas mengenai biaya <i>ta'widh</i> (ganti rugi) atas keterlambatan nasabah setelah jatuh tempo. |



## F. Kerangka Pemikiran

Saat ini begitu banyak pembiayaan yang ada diperbankan syariah, baik itu pembiayaan konsumtif maupun pembiayaan produktif. Pembiayaan tersebut tentu saja menggunakan akad yang berbeda sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dikelurakan perbankan syariah dan tidak menyalahi prinsip-prinsip syariah atau sesuai dengan aturan yang berlaku dalam syariat islam.

Salah satu produk pembiayaan yang ada di perbankan syariah yaitu pembiayaan yang menggunakan kartu dengan berbasis sistem syariah atau yang lebih dikenal dengan kartu kredit syariah, dimana kartu kredit syariah ini termasuk dalam pembiayaan konsumtif.

Kartu kredit syariah adalah kartu yang berbentuk plastik termasuk dalam jenis jasa yang diberikan kepada nasabah untuk bisa memperoleh kredit dari bank untuk digunakan dalam pembelian barang dagangan, penarikan uang tunai, dan pembayaran juga jasa-jasa lainnya. Kartu kredit syariah berfungsi untuk sarana pembayaran, dimana kartu kredit syariah ini pengganti uang tunai pada pembelian secara kredit yang pembeliannya ini hanya bisa digunakan di tempat-tempat tertentu, seperti Departemen Store, Pasar Swalayan, hotel, restoren dan tempat-tempat yang telah mengikat perjanjian dengan bank penerbit kartu (*Issuer*).

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa mengenai kartu kredit syariah yang mana disebut dengan *syariah card*. Adapun fatwa yang mengatur *syariah card* ini yaitu dalam fatwa DSN MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 disebutkan bahwa *Syariah Card* adalah kartu yang berfungsi seperti

kartu kredit yang hubungan hukum berdsasarkan sistem yang sudah ada) antara pihak berdasarkan prinsip syariah.<sup>21</sup>

Kartu kredit syariah hanya dikeluarkan oleh bank-bank tertentu, tidak semua bank syariah mengeluarkan kartu kredit dengan sistem berbasis syariah. Namun PT. Bank BNI Syariah mengeluarkan produk kartu kredit yang berbasis sistem syariah yaitu *iB Hasanah Card*.

*iB Hasanah Card* adalah adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari status kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan pembelanjaan dan atau atas penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi dahulu oleh *acquirer* atau *issuer* (penerbit kartu), dan atas transaksi tersebut maka pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati, baik secara sekaligus maupun secara angsuran.

*iB Hasanah Card* ini berfungsi sebagai kartu kredit, namun pada *iB Hasanah Card* ini tidak diberlakukan sistem bunga yang identik dengan riba, karena *iB Hasanah Card* ini menggunakan mekanisme akad yang berdasarkan pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan ketentuan syariah. Selain itu, dalam pemakaian *iB Hasanah Card* ini tidak boleh melakukan pembelanjaan yang berlebihan pemborosan pemakaian atau bersifat konsumtif.<sup>22</sup>

Dalam *iB Hasanah Card* terdapat beberapa akad yang digunakan yaitu akad *kafalah*, *ijarah* dan *qardh*. Akad *kafalah* adalah penjaminan kepada

---

<sup>21</sup> Fatwa DSN MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 *Syariah Card*. Pdf.

*merchant* (pedagang), akad *ijarah* adalah sebagai penyedia jasa dalam pelayanan pembayaran kartu, dan akad *qardh* adalah pemberian pinjaman secara tunai.

Dalam mekanisme kartu kredit pada umumnya, kartu kredit syariah apabila nasabah telat membayar tagihan setelah jatuh tempo karena akibat dari nasabah yang lalai atau sengaja menunda-nunda pembayaran maka nasabah tersebut akan dikenakan denda keterlambatan (*late charge*).

Dalam ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang *syariah card*, dalam ketentuan keenam dijelaskan bahwa terdapat ketentuan mengenai denda keterlambatan (*late charge*) dan *ta'widh*.

Denda keterlambatan (*late charge*) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan diakui sebagai dana sosial.<sup>23</sup> Dimana denda keterlambatan (*late charge*) adalah hukuman bagi nasabah yang sengaja menunda-nunda pembayaran atau lalai dalam pembayaran agar nasabah lebih bertanggungjawab dalam menunaikan atau menyelesaikan utang piutangnya.

Telah diatur dalam Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 dan juga PBI No.7/46/PBI/2005, bahwa *ta'widh* adalah biaya ganti rugi akibat dari pelanggaran atau kekeliruan yang dilakukan nasabah dengan ketentuan kerugian riil yang mana dapat diperhitungkan dengan jelas dengan upaya untuk memperoleh pembayaran dan bukan kerugian yang diperkirakan terjadi karena

---

<sup>23</sup> Fatwa DSN MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang *syariah card*. Pdf.

adanya peluang yang hilang. *Ta'widh* digunakan untuk menutupi kerugian yang dialami yang mana dapat berupa benda atau uang tunai.<sup>24</sup>

Syarat sah *ta'widh* adalah kerugian yang riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas. Kerugian riil tersebut adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank penerbit kartu (*Issuer*) dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dikeluarkan serta kerugian ini dibebankan kepada pemegang kartu (*card holder*). Adapun jumlah dan besarnya ganti rugi (*tawidh*) harus sesuai dengan kerugian riil yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang.<sup>25</sup> Objek *ta'widh* yaitu harta yang ada dan konkrit serta berharga (dijinkan syariat untuk memanfaatkannya). Di dalam menetapkan ganti rugi (*ta'widh*) unsur-unsur yang paling penting adalah *darar* atau kerugian pada korban.

Dalam hal kepatuhan Syariah, maka Bank Syariah harus menjalankan kegiatan usahanya mengacu pada prinsip-prinsip syariah dan harus memenuhi nilai-nilai syariah. Dengan adanya pemenuhan nilai-nilai syariah maka hal ini menjadi aspek pembeda dengan sistem konvensional dan syariah.

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia No.13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, yang dimaksud dengan kepatuhan adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk didalamnya prinsip syariah.

---

<sup>24</sup> Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah*, Cet.ke-1 (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), 2012), hlm.69.

<sup>25</sup> Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum...*, hlm. 70.

iB Hasanah Card adalah salah satu produk pembiayaan bank Syariah, sesuai dengan dasar operasionalnya yakni syariah Islam. Maka sudah tentu harus mengikuti tata cara bermuamalah yang benar. Karena Islam ada ajaran yang universal telah memberikan pedoman tentang kegiatan ekonomi berupa asas-asas muamalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

#### 1. Asas *Taba'dulul mana'fi'*

Asas *Taba'dulul mana'fi'* berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bagi pihak-pihak yang terlibat.

Asas *Taba'dulul mana'fi'* adalah kelanjutan dari prinsip kepemilikan dalam hukum Islam yang menyatakan bahwa segala yang dilangit dan bumi pada hakikatnya adalah milik Allah SWT. Dengan demikian, manusia sama sekali bukan pemilik yang berhak sepenuhnya atas harta yang ada di bumi ini, melainkan hanya sebagai pemilik hak memanfaatkannya. Prinsip hukum tentang kepemilikan didasarkan atas firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Maidah [5] ayat 17 yaitu:

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَفِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾

“Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: ‘Sesungguhnya Allah itu ialah Al Masih putera Maryam’. Katakanlah: ‘Maka siapakah (gerakan) yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika Dia hendak membinasakan Al Masih putera Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi kesemuanya?’. Kepunyaan Allahlah

<sup>26</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Universitas Islam Bandung, 2004), hlm. 113.

kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya; Dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”<sup>27</sup>

## 2. Asas Pemerataaan

Asas Pemerataaan adalah salah satu bentuk penerapan prinsip keadilan dalam hukum teori Islam.<sup>28</sup> Penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang bertujuan agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, tetapi harus didistribusikan secara merata di antara masyarakat, baik kaya maupun miskin, dengan dasar tujuan ini maka dibuatlah hukum zakat, shodaqoh, infaq.<sup>29</sup> Selain itu, dihalalkannya bentuk-bentuk pemindahan harta dengan cara yang sah, seperti: jual-beli, sewa-menyewa, dsb. Asas ini merupakan pelaksanaan firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Hasyr [59] ayat 7, yaitu:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَلْتَمْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”<sup>30</sup>

<sup>27</sup> Syamsuddin Ali bin Mahrus, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah,, 2002), hlm. 111.

<sup>28</sup> Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm.167.

<sup>29</sup> *Asas-asas Muamalah dalam Islam*, <http://faturjpr.blogspot.co.id/2016/10/asas-asas-muamalah-dalam-islam.html>, diakses pada tanggal 16 Juni 2017 pukul: 14.00 WIB.

<sup>30</sup> Syamsuddin Ali bin Mahrus, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), hlm. 547.

### 3. Asas *Antaradhin*

Asas *antaradhin* merupakan salah satu asas fiqh muamalah yang berarti saling merelakan atau suka sama suka. menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, Kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk muamalat lainnya.<sup>31</sup> Asas ini didasarkan atas firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah: 282 [2] dan Q.S. al-An'am [7] ayat 125.

### 4. Asas *Adamul Gharar*

Asas *adamul gharar* berarti bahwa pada setiap bentuk muamalat tidak boleh ada *gharar* atau tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi.<sup>32</sup> Asas ini adalah kelanjutan dari asas *an taradin*.

### 5. Asas *Al Musawah*

Asas ini memiliki makna kesetaraan atau kesamaan, artinya bahwa setiap pihak pelaku muamalah berkedudukan sama.

### 6. Asas *Ash shiddiq*

Dalam Islam manusia diperintahkan untuk menjunjung kejujuran dan kebenaran, jika dalam bermuamalah kejujuran dan kebenaran tidak dikedepankan, maka akan berpengaruh terhadap keabsahan perjanjian.

---

<sup>31</sup> Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, hlm. 170.

<sup>32</sup> Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah* hlm.171.



Perjanjian yang didalamnya terdapat unsur kebohongan menjadi batal atau tidak sah.

#### 7. Kebebasan Membuat Akad

Kebebasan berakad atau kontrak merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat pada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan klausul apa saja dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta bersama dengan jalan batil.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, secara garis besar prinsip-prinsip hukum Islam harus yang harus dijadikan pedoman dalam melakukan aktivitas dirumuskan sebagai berikut:<sup>33</sup>

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Quran dan as-Sunnah.

Maksud pada prinsip ini yaitu hukum Islam memberikan kebebasan pada setiap orang yang melakukan akad muamalah dengan ketentuan yang di inginkan, asalkan dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan ketentuan dan nilai agama.

2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa ada unsur paksaan.

Pada prinsip ini, memperingatkan agar ada kebebasan berkehendak yang mana pihak-pihak yang bersangkutan selalu diperhatikan.

Pelanggaran dalam kebebasan berkehendak yaitu adanya unsur paksaan

---

<sup>33</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm.15.

atau penipuan, yang berakibat tidak dapat dibenarkannya suatu bentuk akad muamalah.

3. Muamalah dilakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *madharat* dalam hidup masyarakat. Maka segala yang mendatangkan *kemadharatan* harus dapat dihindarkan.

Maksud dalam prinsip ini yaitu memperingatkan bahwa suatu bentuk akad muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan *madharat* dalam kehidupan masyarakat, yang berakibat bahwa segala bentuk akad muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak boleh. Membina hukum berdasarkan kemaslahatan itu harus benar-benar dapat membawa manfaat dan menghindarkan dari *kemadharatan*. Akan tetapi, jika hanya sekedar berdasarkan perkiraan adanya kemanfaatan tanpa mempertimbangkan kemadharatan yang timbul, maka pembinaan hukum yang semacam itu tidak dibolehkan oleh syariat Islam.

4. Muamalah harus dilaksanakan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Prinsip ini menegaskan bahwa dalam melaksanakan hubungan muamalah harus ditegakan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan tahap adanya unsur penindasan. Yang dimaksud keadilan disini adalah

memberikan sesuatu yang menjadi haknya secara seimbang antara jasa yang diberikan dan imbalan yang diterima.<sup>34</sup>

## G. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bank BNI Syariah Cabang Buah Batu Bandung. Dengan pertimbangan bahwa di BNI Syariah Cabang Buah Batu Bandung terdapat permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini disusun berdasarkan metode Deskriptif analisis. Metode Deskriptif analisis adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan data dalam rangka menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut keadaan pada waktu yang sedang berjalan dari pokok suatu penelitian.<sup>35</sup> Seperti pelaksanaan penentuan denda keterlambatan (*late charge*) pada Pembiayaan iB Hasanah Card yang dilihat dari ketentuan Fatwa DSN MUI No.54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card* dan Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang *Ta'widh* serta Peraturan Bank Indonesia Nomor.7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

---

<sup>34</sup> Ganjar Hidayat, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Kartu Kredit Syariah (Studi Hasanah Card BNI Syariah)*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010), hlm. 12. Pdf.

<sup>35</sup> Consuede G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, cetakan 1 (Jakarta: UI-Press, 1993), hlm. 71.

## 2. Sumber Data

Yang dimaksud data penelitian adalah subjek dari mana data yang diperoleh.<sup>36</sup> Apabila penelitian menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut disebut responden yaitu merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti baik pertanyaan tertulis maupun lisan.<sup>37</sup> Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

### a. Data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dilapangan yang menjadi obyek penelitian atau yang diperoleh secara langsung dari responden-responden berupa keterangan-keterangan atau fakta. Data primer didapat dari pihak bank BNI Syariah.

### b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang didapat dari keterangan-keterangan atau pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung. Penunjang yang dijadikan bahan untuk dapat menganalisa dalam pembahasan skripsi ini yang berupa buku-buku, atau sumber-sumber lain yang relevan dengan kajian penelitian ini. Penelitian ini dat sekunder diperoleh dari buku-buku, internet, jurnal dan bahan acuan lainnya.

---

<sup>36</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendektan Praktek*, cet. Ke-12 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 107.

<sup>37</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendektan Praktek*, cet. Ke-11 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), hlm. 114.

### 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif yang dihimpun yaitu data yang berbentuk informasi dari pihak BNI Syariah mengenai iB Hasanah Card.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data melalui tanya jawab yang dilakukan peneliti kepada responden,<sup>38</sup> atau dilakukan terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Wawancara dilakukan dengan staff BNI Syariah Cabang Bandung yaitu bapak Elang Eka.

#### b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan, dilakukan penulis dengan membaca, mendalami dan menelaah berbagai literatur berupa buku-buku dan sumber lain yang dapat digunakan untuk mendukung dengan penyelesaian masalah yang diteliti. Buku-buku yang didapat berkaitan dengan kartu kredit, fatwa DSN MUI, dan *handout* mengenai BNI Syariah iB Hasanah Card.

---

<sup>38</sup> M. Burha Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 126.

## 5. Analisis Data

Data yang telah terkumpul, selanjutnya dianalisis melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a. Mengkaji semua data yang telah diperoleh, baik itu hasil wawancara ataupun hasil studi kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.
- b. Mengklasifikasikannya ke dalam satuan unit dengan pernyataan penelitian.
- c. Mengklasifikasikan data yang telah diklasifikasikan tadi dengan kerangka pemikiran.
- d. Mencari titik temu antara data dan referensi yang telah terkumpul dengan realita di lapangan mengenai iB Hasanah *Card* yang terdapat pada BNI Syariah cabang Bandung.
- e. Mencari kesimpulan yang diperlukan dari data yang dianalisis dengan mengacu pada perumusan masalah dan tujuan penelitian.